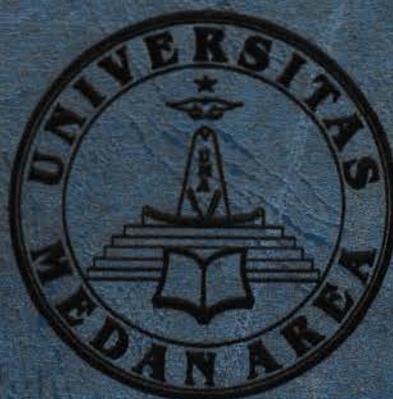


**LAPORAN PENELITIAN**

**ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI TERHADAP  
PERUBAHAN HARGA DASAR GABAH  
(Studi Kasus : Desa Kota Rintang, Kecamatan Hamparan Perak,  
Kabupaten Deli Serdang)**



**OLEH :**

**DRS. KHAIRUL SALEH, MMA.  
NIP. 131.675.581**

**Dosen Kopertis Wilayah I Sumatera Utara  
dpk. Universitas Medan Area**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2007**

LAPORAN PENELITIAN  
642007  
nelitian  
007  
3

**LAPORAN PENELITIAN**

**ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI TERHADAP  
PERUBAHAN HARGA DASAR GABAH  
(Studi Kasus : Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak,  
Kabupaten Deli Serdang)**



**OLEH :**

**DRS. KHAIRUL SALEH, MMA.  
NIP. 131.675.581**

**Dosen Kopertis Wilayah I Sumatera Utara  
dpk. Universitas Medan Area**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 0 7**

## LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Analisis Pendapatan Petani Padi Terhadap Perubahan Harga Dasar Gabah (Studi Kasus : Desa Kota Rantang, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang)
2. Peneliti  
Nama : Drs. Khairul Saleh, MMA.  
NIP : 131.675.581  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pangkat/Gol. : Lektor / III (c)  
Univ/Instansi : Fakultas Pertanian Universitas Medan Area
3. Lokasi Penelitian : Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang
4. Lama Penelitian : 2 (dua) bulan
5. Biaya Penelitian : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)



Medan, Agustus 2007



Mengetahui/Menyetujui  
Dekan,

(Prof. Dr. Ir. A. Rafiqi Tantawi, MS.)

Peneliti

(Drs. Khairul Saleh, MMA.)

Lembaga Penelitian  
Ketua,  
  
(Ir. Roeswandy)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmad dan hidayahNya sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini berjudul : Analisis Pendapatan Petani Padi Terhadap Perubahan Harga Dasar Gabah (Studi Kasus : Desa Kota Rantang, Kec. Hampran Perak, Kab. Deli Serdang), yang dimaksudkan sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantun, saran dan kritik yang membangun sehingga penelitian ini berjalan dengan baik. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2007

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	6
2.2 Landasan Teori .....	11
2.3 Kerangka Pemikiran .....	14
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Daerah Penelitian .....	16
3.2 Penentuan Sampel .....	16
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	17
3.4 Metode Analisis Data .....	17
3.5 Defenisi dan Batasan Operasional.....	17
BAB IV. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN DAN KARAKTERISTIK PETANI SAMPEL	
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian .....	19
4.1.1 Luas dan Topografi Desa .....	19

4.1.2 Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan .....	19
4.1.3 Keadaan Penduduk .....	20
4.1.4 Perekonomian Desa .....	21
4.1.5 Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	22
4.2 Sarana dan Prasarana .....	22
4.3 Karakteristik Petani Sampel .....	23
<b>BAB V. HASIL PEMBAHASAN</b>	
5.1 Dampak Peningkatan Harga Gabali Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Secara Keseluruhan .....	28
5.2 Perbedaan Dampak Peningkatan Harga Beras Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Pada Beberapa Strata Luas Lahan .....	30
5.2.1 Uji Beda Rata-rata Pendapatan Bersih Luas Lahan <0,5 ha .....	30
5.2.2 Dampak Peningkatan Harga Beras Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Pada Luas Lahan 0,5-1 ha .....	32
5.2.3 Dampak Peningkatan Harga Beras Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Pada Luas Lahan >1 ha .....	34
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1 Kesimpulan .....	37
6.2 Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan yang paling esensial dalam kehidupan manusia sebagai individu dan manusia sebagai satu kesatuan dalam keluarga. Kekurangan pangan penduduk dalam satu negara akan menimbulkan eksese yang negatif bagi akselerasi pembangunan Nasional, sebab kurangan pangan dapat menjadi pemicu terhadap stabilitas politik dan keamanan Nasional. Berdasarkan pemikiran itulah maka GBHN 1999-2004 menetapkan kebijakan pembangunan pertanian diarahkan untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang diperlukan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan, bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kesediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya, masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi.

Setelah sempat mencapai swasembada beras pada tahun 80-an, ternyata ketahanan pangan Indonesia terus mengalami penurunan. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan pemerintah dan mengapa berbagai program tersebut justru semakin menimbulkan kerawanan pangan dan bukannya ketahanan pangan.

Dari sisi konsumsi terlihat bahwa Indonesia merupakan Negara pengkonsumsi beras terbesar di dunia (133 Kg perkapita/tahun), sementara untuk konsumsi ikan (12.5 Kg perkapita/tahun), ayam (3.8 Kg perkapita/tahun) dan kedele (6.01 Kg perkapita/tahun) masih jauh di bawah konsumsi negara-negara maju. Hal ini membawa akibat kepada terbentuknya pola konsumsi yang tidak seimbang antara kebutuhan dan produksi yang tersedia. Pada tahun 2004 saja misalnya untuk mencukupi kebutuhan beras Indonesia harus mengimpor beras lebih dari 2 juta ton dan biji kedelai 1 juta ton dan itu tidak hanya pada beras dan kedele, Indonesia juga pengimpor besar untuk kebutuhan pangan nasional seperti daging sapi, telur, gula dan susu. Hal ini disebabkan terus meningkatnya kebutuhan pangan sebagai akibatnya bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya konsumsi perkapita sejalan dengan peningkatan pendidikan masyarakat di satu sisi tetapi pada sisi lain terjadi penurunan rill produksi di sub sektor tanaman pangan.

Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga baik dalam jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menyadari bahwa pencapaian target ketahanan pangan merupakan usaha strategis yang harus dilakukan secara

Setelah sempat mencapai swasembada beras pada tahun 80-an, ternyata ketahanan pangan Indonesia terus mengalami penurunan. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan pemerintah dan mengapa berbagai program tersebut justru semakin menimbulkan kerawanan pangan dan bukannya ketahanan pangan.

Dari sisi konsumsi terlihat bahwa Indonesia merupakan Negara pengonsumsi beras terbesar di dunia (133 Kg perkapita/tahun), sementara untuk konsumsi ikan (12.5 Kg perkapita/tahun), ayam (3.8 Kg perkapita/tahun) dan kedele (6.01 Kg perkapita/tahun) masih jauh di bawah konsumsi negara-negara maju. Hal ini membawa akibat kepada terbentuknya pola konsumsi yang tidak seimbang antara kebutuhan dan produksi yang tersedia. Pada tahun 2004 saja misalnya untuk mencukupi kebutuhan beras Indonesia harus mengimpor beras lebih dari 2 juta ton dan biji kedelai 1 juta ton dan itu tidak hanya pada beras dan kedele, Indonesia juga pengimpor besar untuk kebutuhan pangan nasional seperti daging sapi, telur, gula dan susu. Hal ini disebabkan terus meningkatnya kebutuhan pangan sebagai akibatnya bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya konsumsi perkapita sejalan dengan peningkatan pendidikan masyarakat di satu sisi tetapi pada sisi lain terjadi penurunan rill produksi di sub sektor tanaman pangan.

Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga baik dalam jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menyadari bahwa pencapaian target ketahanan pangan merupakan usaha strategis yang harus dilakukan secara

terus menerus dan berkesinambungan. Konsekwensi logisnya adalah, peran dan partisipasi masyarakat seperti kelembagaan tani, kelembagaan pedesaan, dan aparatur swasta menjadi penting dalam membantu aparat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Propinsi Sumatera Utara yang mempunyai sumber daya alam yang cukup potensial, sudah sewajarnya harus mampu mencukupi kebutuhan pangan seperti beras bagi penduduknya, karena pangan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Meskipun swasembada beras pernah dicapai pada tahun 1986, namun dengan adanya gangguan iklim dan berbagai perubahan pembangunan ekonomi, maka propinsi Sumatera Utara pada tahun 2001 dan 2002 mengalami penurunan produksi (Moeis, E., 2004).

Beras menjadi ujung tombak ketahanan pangan wilayah dan nasional. Peran itu sudah terjadi sejak berabad-abad lalu dan disistematisasikan pada masa pemerintahan orde baru. Dengan demikian, kepentingan ketahanan pangan sekaligus kepentingan tenaga kerja dan kependudukan bukan lagi menjadi isu ekonomi dan perdagangan semata, tetapi menjadi wilayah politik ekonomi karena aspek strategis berbagai bidang itu menuntut peran pemerintah yang proporsional dan efektif (Rachbini,D,J., 2005).

Pada tahun 2006 pemerintah menaikkan Harga Pembelian Padi/Gabah (HPP) dan beras yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 2005, yang berlaku untuk Januari 2006. Harga gabah kering panen (GKP) terus dari Rp 1.330 per kg menjadi Rp 1.730 per kg, pemerintah tidak menyiapkannya dengan baik. Salah satu buktinya, saat ada kenaikan harga beras pada bulan Desember

tahun lalu, banyak pihak mengatakan, karena stok beras bermasalah. Persoalan itu tidak mereka lihat dalam konteks akibat rencana penerapan HPP yang baru. Satu bulan sebelum kenaikan HPP diterapkan, yaitu sekitar Desember, harga beras mulai mengalami kenaikan. Bila pemerintah cermat, sebenarnya kenaikan itu tidak karena stok menipis. Saat itu pedagang sesungguhnya cenderung menahan stok sebagai tindakan antisipasi kenaikan HPP. Pedagang membeli beras pada saat harga murah dan ingin melepas begitu pemerintah menerapkan HPP yang baru pada tanggal 1 Januari 2006. Keuntungan akan didapat pedagang dengan menahan stok karena pemerintah menaikkan HPP untuk gabah kering panen. Penahanan ini mengakibatkan harga jual di pasar terus menanjak (Maryoto, A., Kompas 4 Feb 2006).

Harga beras mengalami peningkatan dari setiap tahun. Peningkatan harga beras ini diakibatkan oleh adanya isu yang beredar tentang pemberlakuan tentang kebijakan impor beras. Karena khawatir beras dalam negeri akan rendah, maka harga beras lokal meningkat. Harga beras ditingkat penggilingan padi yang sebelumnya Rp 3.000 per kg meningkat menjadi Rp 3.300 sampai pada tingkat harga Rp 3.400 per kg. selain disebabkan tak adanya panen padi, naiknya harga beras ini disebabkan tingginya permintaan pasar beras karena stok di pasar kosong. Ini disebabkan akibat kekhawatiran kalangan penguasa dan importir untuk memasarkan beras impor ilegal (Kompas, 27 Des 2005).

Pada dasarnya impor beras akan mencederai nasib petani. Namun, bila pemerintah tidak mengimpor beras, mungkin akan lebih banyak rakyat Indonesia dicercai dengan mahalnnya harga beras. Rakyat ingin harga beras terjangkau (murah), tetapi ini tak sejalan dengan keinginan petani yang nasibnya terus terpuruk. Petani ingin harga lebih tinggi. Ekonomi perberasan memang bagai buah

simalakama. Harga beras naik petani senang, tetapi rakyat susah. Harga beras turun rakyat bahagia, tetapi petani sengsara. Maka, pemerintah perlu bersikap arif menetapkan kebijakan perberasan ini (Khomsan, Kompas 22 Des 2006).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Gabah di tentukan
2. Bagaimanakah Faktor perubahan harga terhadap perubahan pendapatan petani di daerah penelitian

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Beras di tentukan
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Faktor perubahan harga terhadap perubahan pendapatan petani di daerah penelitian

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan bagi para petani agar dapat mengetahui informasi tentang harga pembelian pemerintah terhadap Gabah
2. Sebagai bahan referensi atau sumber informasi bagi pihak- pihak yang membutuhkan.
3. Bahan masukan bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

### 2.1 Tinjauan Pustaka

Padi merupakan tanaman pertanian kuno yang sampai sekarang menjadi tanaman utama dunia. Bukti sejarah di Propinsi Beijing, Cina Selatan menunjukkan bahwa padi di Asia sudah dimulai 7000 tahun yang lalu. Beberapa daerah yang diduga menjadi daerah asal padi adalah India Utara bagian timur, Banglades Utara daerah yang membatasi Negara Burma, Thailand, Laos, Vietnam dan Cina bagian selatan ( Suparyono dan Setyono, 1993:1).

Tanaman padi merupakan tanaman semusim (annual), termasuk golongan rumput- rumputan dengan klasifikasi sebagai berikut:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Sub division	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledoneae
Genus	: <i>Oriza</i> Linn
Family	: Graminae
Species	: <i>Oryza sativa</i> L

Curah hujan yang dikehendaki pertahun sekitar 1500 – 2000 mm. Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik pada suhu 23°C ke atas. Pengaruh suhu tidak terasa di Indonesia, sebab suhunya hampir konstan sepanjang tahun. Ketinggian tempat cocok untuk tanaman padi adalah 0 – 65 m di atas permukaan laut. ( AAK, 1990)

Padi merupakan bahan makanan yang menghasilkan beras. Meskipun sebagai bahan makanan pokok padi dapat di gantikan oleh bahan makanan lainnya. Namun padi memiliki nilai tersendiri bagi orang yang biasa makan nasi dan tidak dapat mudah digantikan oleh bahan makanan lainnya ( AAK, 1990).

Komoditi beras bagi masyarakat Indonesia bukan saja merupakan bahan pangan pokok, tetapi sudah merupakan komoditi sosial. Oleh karena itu, perubahan- perubahan yang terjadi pada beras akan begitu mudah mempengaruhi kehidupan social- ekonomi yang lain. Perhatian pemerintah terhadap beras sudah lama di mulai dan bahkan setelah Indonesia merdeka, perhatian terhadap beras ini sudah menjadikan program prioritas (Anonymous, 2004).

Beras bagi kehidupan bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting. Dari jenis bahan pangan yang dikonsumsi, beras memiliki urutan utam. Hampir seluruh penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai bahan pangan utama. Beras merupakan nutrisi penting dalam struktur pangan, karena itu peranan beras memiliki peranan srategis dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tingkat partisipasi konsumsi beras di berbagai wilayah baik di kota maupun di desa cukup tinggi yaitu sekitar 97 – 100 %. Konsumsi dalam negeri cenderung meningkat terutama didorong oleh pertumbuhan penduduk. Kebutuhan konsumsi beras per kapita/ tahun di Sumatera Utara yaitu 166, 28 kg. Cadangan/ stok akhir ideal adalah tiga kali kebutuhan per bulan. Tingkat konsumsi beras perkapita tahun 2004 adalah 133, 23 kg. harga gabah kering giling (GKG) Rp 1.720/ kg, harga gabah kering simpan (GKS) Rp 1.500/ kg dan harga gabah kering giling di Bulog adalah Rp 1.725/ kg sesuai Inpres RI Nomor 9 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 (Gubernur SUMUT,2004).

Pergerakan barang dari suatu daerah ke daerah lain didorong oleh adanya perbedaan harga yang merupakan mekanisme dinamis pasar dalam mencapai terwujudnya keseimbangan. Pergerakan ini terjadi karena adanya perbedaan jumlah ketersediaan beras dan perbedaan preferensi dan daya beli masyarakat. Harga beras mempunyai pengaruh yang besar bagi konsumen komoditas pangan lainnya. Sebaliknya, perubahan harga- harga komoditas non beras berpengaruh relative kecil terhadap konsumen beras. Setelah memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk setempat, apabila masih ada surplus maka kelebihan stok beras akan di perdagangkan untuk memenuhi daerah- daerah sekitarnya terutama daerah defisit beras. Hubungan perdagangan antar daerah adalah bagian dari mekanisme sistem pasar yang akan membawa kearah keseimbangan permintaan dan penawaran pada tingkat nasional ( Tim Pengkajian Kebijakan Perberasan Nasional, 2001).

Campur tangan pemerintah dalam ekonomi perberasan nasional pada dasarnya ada lima yaitu: meningkatkan produksi padi, meningkatkan pendapatan petani, mengurangi ketidakstabilan harga di produsen dan konsumen, dan mengendalikan keseimbangan harga beras di antara pasar domestic dengan pasar internasional. Stabilisasi harga beras oleh pemerintah dilakukan melalui mekanisme *buffer stock*, yaitu dengan menetapkan harga dasar dan harga batas tertinggi. Harga dasar (minimum) di jamin pemerintah untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak terkendali terutama pada musim paceklik. Ini semuanya diusahakan dengan pengadaan beras dikala panen dan penyaluran di kala paceklik

( Tim Pengkajian Kebijakan Perberasan Nasional, 2001).

Kebijakan pengadaan pangan yang selama ini diterapkan bertujuan untuk menjamin kecukupan pasokan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pengadaan pangan tersebut dapat dipenuhi melalui produksi domestik dan impor produk pangan dari negara lain. Ketergantungan pangan terhadap impor akan menciptakan kerentanan ketahanan pangan nasional berkaitan dengan resiko dan ketidakpastian penyediaan pangan dunia dan situasi pasar pangan internasional. Adapun satu hal pokok yang memerlukan penanganan dengan seksama dalam kaitannya dengan pelaksanaan impor adalah: membatasi masuknya impor secara berlebihan yang dapat berdampak negatif pada pembangunan pertanian dan industrinya di dalam negeri dan tidak melanggar aturan internasional yang telah disepakati. Disamping itu Indonesia merupakan peluang pasar bagi negara lain mengingat jumlah penduduk yang besar, apabila tidak dapat dibatasi maka produk impor dapat merusak perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Impor beras dalam dekade ini terus meningkat sehingga harga beras dalam negeri akan semakin menurun. Hal ini akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan petani semakin buruk (Anonymous, 2004).

Meningkatnya impor komoditas pertanian antara lain disebabkan lebih rendahnya harga komoditas tersebut dipasar internasional dibanding harga domestik, dan kondisi ini diperburuk lagi dengan tidak dimanfaatkannya batas maksimum bea masuk sesuai komitmen Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*). Kesenjangan harga ini juga dimungkinkan sebagai akibat terjadinya penyeludupan baik secara fisik maupun secara administratif atau lebih dikenal dengan "*under invoicing*" yang saat ini disinyalir marak kembali. Keadaan ini mengakibatkan hilangnya sebagian pendapatan negara dari bea masuk dan pajak impor lainnya. Disamping itu dengan tidak diketahuinya secara pasti total impor komoditas pangan utama (khususnya beras) akan berdampak rawan pada

sistem ketahanan pangan nasional, yang menyebabkan upaya-upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem ketahanan pangan nasional akan menjadi tidak efektif (Anonymous, 2004).

Kebijakan harga dasar merupakan dua persoalan yang berbeda, meskipun memiliki kaitan. Harga dasar sebagai instrumen untuk melindungi petani dari jatuhnya harga saat panen karena surplus musiman serta jaminan terhadap profitabilitas usahatani padi yang wajar masih diperlukan. Tingkat harga dasar perlu ditetapkan secara nasional. Ukuran yang dapat dipakai adalah seberapa besar peranan harga diharapkan menyumbang pendapatan petani, serta seberapa besar tingkat proteksi yang diberikan kepada petani terhadap harga beras dunia. Semakin tinggi kontribusi pendapatan dan proteksi yang diharapkan akan menaikkan tingkat harga dasar. Demikian pula sebaliknya. Masalah perberasan merupakan masalah yang sangat kompleks. Peranan pemerintah dengan lembaga penyanggah (BULOG) sangat diharapkan yang bertujuan untuk memantau, menjaga dan menstabilkan harga dan pasokan beras di pasar (Sumodiningrat, 2001).

Tahun 2001 ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang harga beras yang baru tanpa membedakan wilayah. Penetapan Kebijakan Perberasan menginstruksikan badan/ departemen terkait untuk memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional, memberikan dukungan bagi diversifikasi (penganekaragaman) kegiatan ekonomi petani dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian beras oleh pemerintah. Tujuan dari pada

pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen dan petani serta menjaga kestabilan harga (Irawan, 1997).

## 2.2 Landasan Teori

Harga beras/padi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan ekonomi, karena beras/ padi dihasilkan oleh banyak sekali petani, yang merupakan sebagian besar dari penduduk, dan dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, dan pengeluaran untuk beras merupakan bagian besar dari biaya hidup rakyat. Dengan demikian maka jika harga beras terlalu rendah, pendapatan para petani terlalu rendah, dan mereka menjadi korban; sedang kalau harga terlalu tinggi, maka konsumen yang menjadi korban (Kadariah, 1994).

Bila harga yang harus dibayar lebih rendah daripada harga optimal ini konsumen memperoleh "keuntungan." Keuntungan ini biasanya disebut surplus konsumen (*consumer's surplus*). Konsumen surplus adalah selisih antar nilai total yang diberikan konsumen pada semua unit yang dikonsumsi dari suatu komoditi dan jumlah yang harus ia bayarkan untuk mendapatkan (membeli) jumlah komoditi tersebut (Sudarsono, 1995).

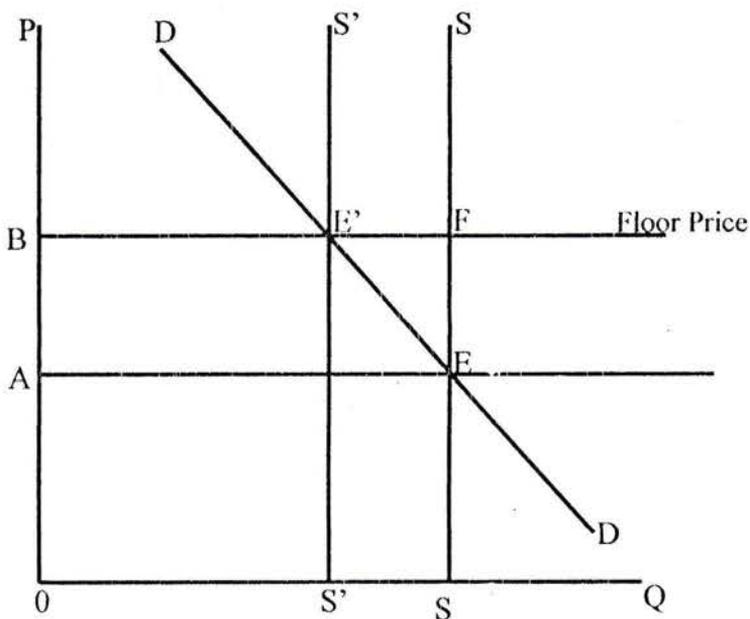
Dalam teori ekonomi mikro surplus konsumen menunjukkan terjadinya kelebihan kepuasan yang dinikmati konsumen. Kelebihan kepuasan ini muncul dari adanya perbedaan antar kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi sejumlah komoditi dengan pembayaran yang harus dikeluarkannya untuk memperoleh komoditi tersebut (Sugiarto *dkk*, 2000).

Pemerintah dapat menjamin kepada petani suatu tingkatharga yang lebih tinggi dari pada harga ekuilibrium dengan menentukan suatu price floor, tingkat



harganya disebut floor price. Pada tingkat yang lebih tinggi ini tidak seluruh hasil produksi terbeli oleh konsumen. Sisanya dibeli oleh pemerintah dengan harga floor price untuk ditimbun; jika tidak demikian, maka harga akan turun kembali ketinggian semula (Kadariah,1994).

Berikut ini akan dijelaskan dalam gambar 1 penentuan floor- price dan pembelian kelebihan hasil oleh pemerintah:

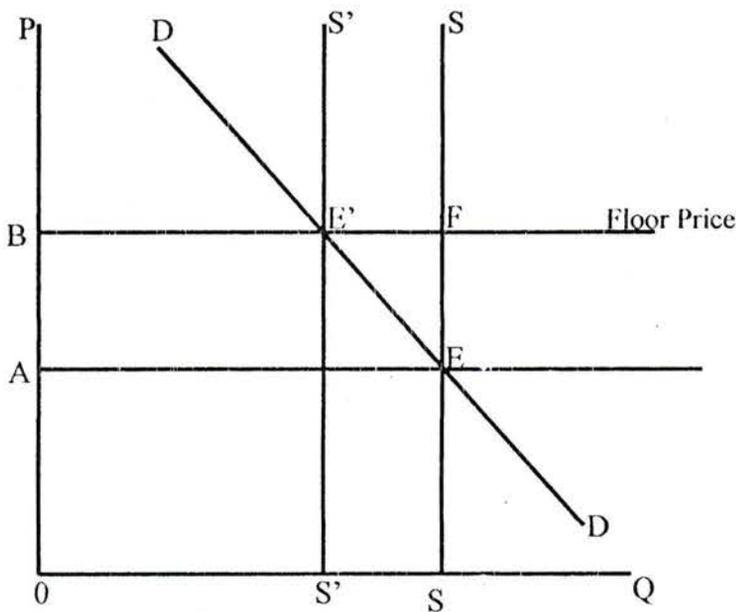


**Gambar.1. Penentuan Floor- Price dan Pembelian Kelebihan Hasil oleh Pemerintah**

Dari Gambar 4. dapat dilihat bahwa jumlah yang ditawarkan adalah OS; harga ekuilibrium adalah  $SE = OA$ . Jika tidak ada kebijaksanaan pemerintah, penerimaan total petani adalah OSEA. Sekarang pemerintah menentukan floor price setinggi OB. Jika yang dibeli konsumen turun sampai OS', sisanya sebesar S'S dibeli pemerintah dengan harga floor-price (Kadariah,1994).

harganya disebut floor price. Pada tingkat yang lebih tinggi ini tidak seluruh hasil produksi terbeli oleh konsumen. Sisanya dibeli oleh pemerintah dengan harga floor price untuk ditimbun; jika tidak demikian, maka harga akan turun kembali ke tingkat semula (Kadariah,1994).

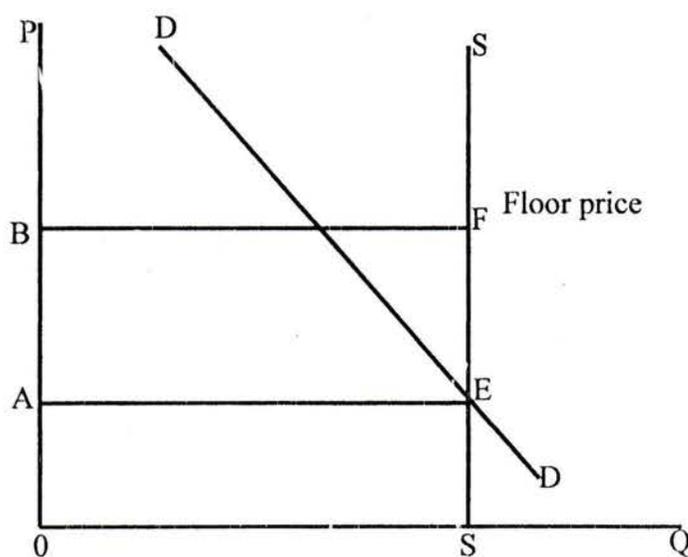
Berikut ini akan dijelaskan dalam gambar 1 penentuan floor-price dan pembelian kelebihan hasil oleh pemerintah:



**Gambar.1. Penentuan Floor- Price dan Pembelian Kelebihan Hasil oleh Pemerintah**

Dari Gambar 4. dapat dilihat bahwa jumlah yang ditawarkan adalah OS; harga ekuilibrium adalah  $SE = OA$ . Jika tidak ada kebijaksanaan pemerintah, penerimaan total petani adalah OSEA. Sekarang pemerintah menentukan floor price setinggi OB. Jika yang dibeli konsumen turun sampai OS', sisanya sebesar S'S dibeli pemerintah dengan harga floor-price (Kadariah,1994).

Beras yang merupakan bahan makanan yang tidak dapat ditimbun, dan harus dijual kepada konsumen dengan tingkat harga dipasar. Jadi konsumen tetap membayar harga ekuilibrium yang rendah dan mendapat jumlah yang terjual pada tingkat harga itu, sedang produsen menerima harga floor price yang dicantumkan oleh pemerintah, juga untuk jumlah yang dibeli oleh konsumen. Selisih antara harga ekuilibrium dan floor price ini dibayar oleh pemerintah berupa subsidi kepada petani. Disini konsumen tidak dirugikan ( Kadariah, 1994).



**Gambar.2. Pemerintah Menyubsidi selisih antara Harga yang Dibayar Konsumen dan Floor Price**

Dari Gambar 2. dapat diketahui bahwa jumlah yang dihasilkan adalah jumlah yang dibeli oleh konsumen = OS. Konsumen membayar harga ekuilibrium  $SE = OA$ . Produsen menerima subsidi dari pemerintah sebesar antara harga yang dijamin pemerintah dan harga yang dibayar oleh konsumen, ialah  $EF = AB$ .

### 2.3 Kerangka Pemikiran

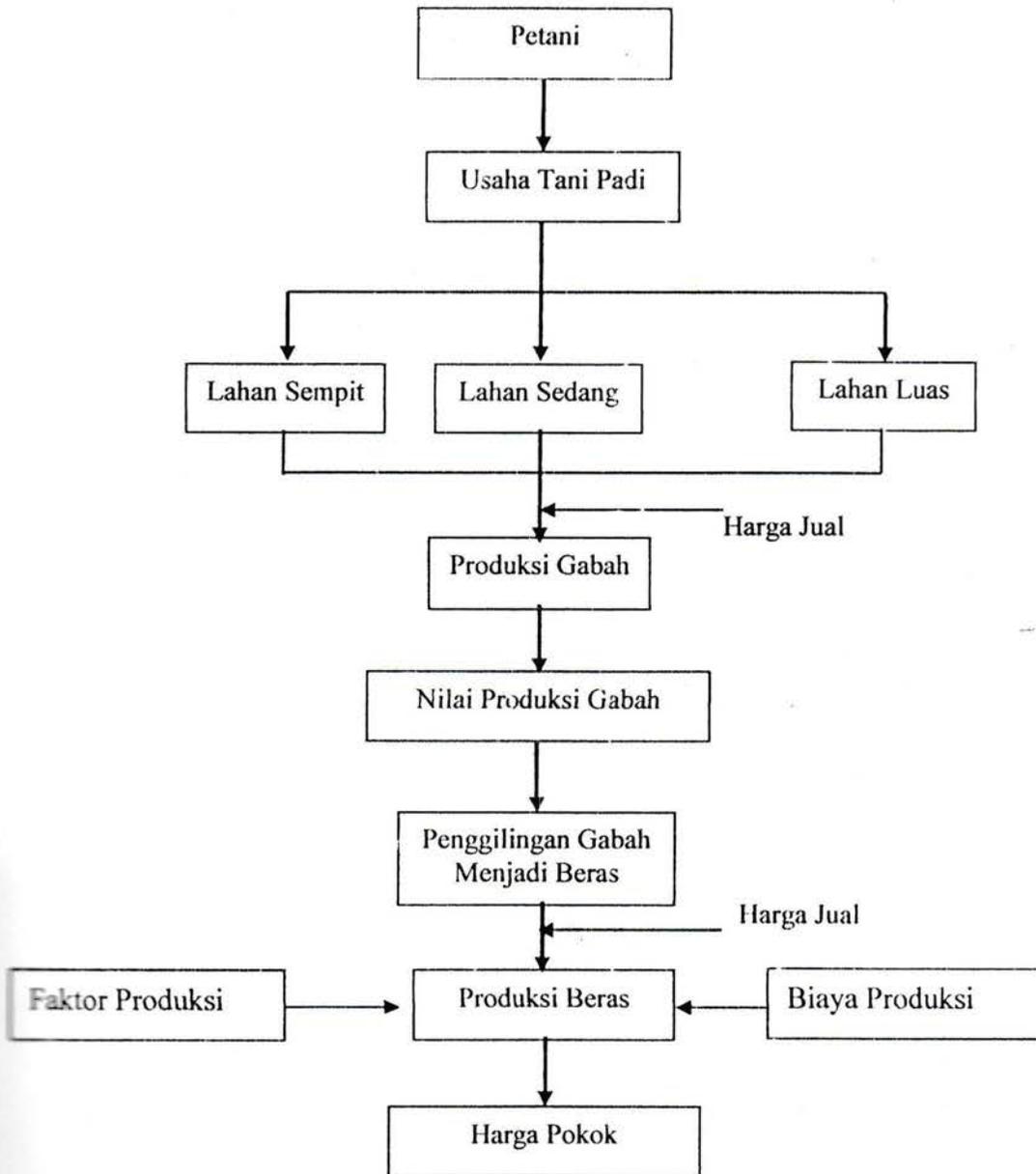
Propinsi Sumatera Utara merupakan negara agraris yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu daerah penghasil beras adalah Kabupaten Deli Serdang. Di daerah ini, masyarakatnya hidup dari mata pencaharian sebagai petani, dan salah satu komoditi pertanian yang berkembang di daerah ini adalah usaha tani padi baik itu padi sawah maupun padi ladang. Hampir setiap tahunnya di daerah ini produksi beras selalu meningkat dari tahun ketahun. Oleh sebab itu, layak dikatakan jika daerah ini merupakan lumbung beras yang paling banyak di Sumatera Utara.

Makanan pokok para penduduk di Propinsi Sumatera Utara adalah nasi. Konsumen beras di Sumatera Utara dapat dibedakan sebagai konsumen yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan. Adapun penduduk Sumatera Utara lebih banyak yang tinggal di daerah pedesaan.

Kebutuhan akan beras oleh penduduk desa juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, hal ini disebabkan karena perbedaan tingkat pendapatan, juga tidak terlalu banyak atau kurang beragamnya makanan pengganti nasi yang dijual di daerah pedesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan yang sangat banyak jenis dan macam makanan yang diperjualbelikan.

Harga beras yang tidak menentu selalu merugikan petani. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan atau keadaan politik negara yang tidak stabil. Akibatnya petani semakin merugi dan bahkan petani semakin enggan untuk bertani.

Gambar 3. Skema Kerangka Pemikiran



### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Daerah Penelitian

Daerah penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) yaitu di Desa Kota Rintang, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Adapun alasan pemilihan daerah tersebut adalah karena desa Kota Rintang, Kabupaten Deli Serdang merupakan lokasi pengembangan komoditi padi di Sumatera Utara dan juga merupakan sentra produksi beras yang telah dapat berswasembada.

#### 3.2 Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua petani padi yang mengelola usahatani padi di Desa Kota Rintang Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. Sampel pada penelitian ini adalah petani pemilik atau penyewa tanah yang mengusahakan lahannya dengan tanaman padi. Penarikan sampel dilakukan secara acak berlapis (*stratified random sampling*) berdasarkan luas lahan yang dikuasai petani. Sampel ditetapkan sebanyak 30 KK dari 211 KK populasi petani padi, dimana populasi petani distratakan berdasarkan luas lahan usahatani padi.

**Tabel. 1. Populasi Dan Sampel Petani Di Desa Kota Rintang**

Strata	Luas Lahan (Ha)	Populasi (KK)	Sampel (KK)
I	<0,5	108	15
II	0,5 - 1	76	11
III	> 1	27	4
<b>Jumlah</b>		<b>211</b>	<b>30</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Kota Rintang, 2006

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar kuisisioner yang telah disiapkan terlebih dahulu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang mendukung penelitian dan lembaga- lembaga instansi pemerintah dan lembaga- lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis tujuan pertama digunakan analisis diskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan secara lengkap tentang bagaimana pemerintah menetapkan harga pembelian Gabah oleh petani .

Untuk menganalisis tujuan kedua adalah dengan cara menganalisis perubahan harga pembelian pemerintah terhadap perubahan tingkat pendapatan petani.

### **3.5 Defenisi dan Batasan Operasional**

1. Usaha tani padi adalah sistem budidaya yang dijalankan oleh petani dengan memanfaatkan faktor produksi seoptimal mungkin yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
2. Lahan sempit adalah lahan yang diusahakan petani yang luasnya dibawah 0,5 ha di daerah penelitian.
3. Lahan sedang adalah lahan yang diusahakan petani yang luasnya antara 0,5- 1 ha di daerah penelitian.

4. Lahan luas adalah lahan yang diusahakan petani yang luasnya diatas 1 ha di daerah penelitian.
5. Produksi adalah hasil panen padi yang berupa gabah kering (Kg)
6. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh petani selama proses produksi beras berlangsung sampai pada tahap penjualan (Rp)
7. Harga beras adalah harga yang berlaku dipasar atau harga yang ditetapkan oleh pemerintah (Rp)

## IV. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN DAN KARAKTERISTIK PETANI SAMPEL

### 4.1 Deskripsi Daerah Penelitian

#### 4.1.1 Luas dan Topografi Desa

Penelitian dilakukan di Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Desa Kota Rantang mempunyai luas wilayah 650 Ha dengan jumlah penduduk 1670 jiwa

Desa Kota Rantang berjarak 5 Km dari ibukota kecamatan dengan waktu tempuh 15 menit dan berjarak 60 Km dari Kabupaten Deli Serdang dengan waktu tempuh 180 menit serta berjarak 32 Km dari ibukota Propinsi Sumatera Utara dengan waktu tempuh 90 menit.

Topografi daerah penelitian adalah dataran dengan ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut dengan temperatur  $26^{\circ}\text{C}$  -  $33^{\circ}\text{C}$ , sedangkan curah hujan berkisar antara 1100 – 1400 mm/ tahun.

Secara administratif, Desa Kota Rantang berbatasan dengan :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Paluh Manan
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bulu Cina
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulu Cina dan Kota Datar
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kelambir

#### 4.1.2 Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan

Luas wilayah daerah penelitian menurut fungsinya dibagi atas areal persawahan, perkebunan, dan pemukiman. Penggunaan lahan Desa Kota Rantang dapat dilihat pada tabel 2:

**Tabel 1. Jenis dan Luas Penggunaan Tanah**

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Persawahan	450	69,23
2	Perkebunan	100	15,38
3	Pemukiman	50	15,39
<b>Jumlah</b>		<b>650</b>	<b>100</b>

Sumber : Kantor Kepala Desa Kota Rantang, 2007

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa penggunaan tanah sebagai areal persawahan merupakan yang terluas yaitu 450 Ha (69,23%). Lahan persawahan digunakan untuk menanam padi. Jenis varietas padi yang diusahakan adalah padi IR 64 dan Ciherang.

#### 4.1.3 Keadaan Penduduk

Penduduk yang ada didaerah penelitian terdiri dari dua suku yang terdiri atas suku Banjar dan suku Jawa. Jumlah penduduk desa daerah penelitian berjumlah 1670 jiwa dan jumlah rumah tangga 211 kepala rumah tangga (KK). Jumlah dan distribusi penduduk desa penelitian dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Distribusi Penduduk menurut Kelompok Umur**

No.	Umur ( Tahun )	Jumlah ( Jiwa )	Persentase ( % )
1	0 - 14	561	33,59
2	15 - 29	490	29,34
3	30 - 44	392	23,48
4	45 - 60	185	11,08
5	> 60	42	2,51
<b>Jumlah</b>		<b>1670</b>	<b>100</b>

Sumber : Kantor Kepala Desa Kota Rantang, 2007

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa sebagian penduduk Desa Kota Rantang berada pada usia produktif antara (15 - 60 tahun) yaitu sebanyak 63,90%. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan tenaga kerja pada daerah ini cukup banyak.

Selebihnya berada pada usia muda (0 – 14 tahun) yaitu sebanyak 33,59% dan pada usia lanjut (>60 tahun) sebanyak 2,51%.

Pada umumnya masyarakat Desa Kota Rantang saling mengenal satu sama lainnya. Kekeluargaan terlihat jelas dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Bahasa sehari-hari yang digunakan sebagai alat komunikasi adalah bahasa Jawa dan Banjar, namun pada umumnya masyarakat mengerti bahasa Indonesia.

#### 4.1.4 Perekonomian Desa

Mata pencaharian utama penduduk Desa Kota Rantang adalah petani, selain itu ada sebagian yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS), dan pedagang. Sebagai gambaran keadaan penduduk dan struktur ekonominya dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Distribusi Penduduk menurut Mata Pencaharian**

No.	Uraian	Kepala Keluarga (KK)	Persentase ( % )
1	Petani	170	80,57
2	PNS	15	7,11
3	Perdagangan/ jasa	26	12,32
<b>Jumlah</b>		<b>211</b>	<b>100</b>

Sumber : Kantor Kepala Desa Kota Rantang, 2007

Dari Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian utama penduduk Desa kota Rantang adalah bertani yaitu sebanyak 170 KK atau 80,07% dari total jumlah kepala keluarga. Bertani dalam hal ini bukan hanya para petani tanaman padi tetapi juga petani yang mengusahakan tanaman sayur- sayuran.

Persentase paling kecil adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hanya 15 KK (7,11%) saja. Penduduk desa yang berprofesi sebagai pedagang pada daerah ini mencapai 24 KK (12,32%).

#### ✓ 4.1.5 Distribusi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan formal di desa penelitian dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Distribusi Penduduk menurut Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( Jiwa )	Persentase ( % )
1	Belum sekolah dan tidak tamat SD	245	14,67
2	Tamat SD	443	26,53
3	Tamat SLTP	486	29,10
4	Tamat SLTA	473	28,32
5	Tamat Akademi/ D1- D3	13	0,78
6	Tamat Perguruan tinggi	10	0,60
<b>Jumlah</b>		<b>1670</b>	<b>100</b>

Sumber : Kantor Kepala Desa Kota Rantang, 2007

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa penduduk di desa penelitian dengan tingkat pendidikan SLTA adalah 473 jiwa (28,32%), kemudian tamatan akademi/ D1 – D3 sebanyak 13 jiwa (0,78%), tamatan perguruan tinggi sebanyak 10 jiwa (0,60%). Dari segi pendidikan dapat dikatakan bahwa wawasan penduduk desa penelitian sudah cukup luas.

#### ✓ 4.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Desa Kota Rantang pada saat ini dinilai kurang baik, mengingat Desa Kota Rantang yang masih jauh dari perkotaan sehingga masyarakat yang tinggal didaerah penelitian tidak dapat menjual hasil pertaniannya dengan lancar. Prasarana jalan dinilai kurang baik karena mulai jalan menuju desa Kota Rantang tidak diaspal. Sarana dan prasarana sangat

mempengaruhi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5:

**Tabel 5. Sarana dan Prasarana Daerah**

No.	Sarana Dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TK</li> <li>▪ SD</li> <li>▪ SLTP</li> <li>▪ SMU</li> </ul>	0 2 1 0
2	Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rumah Sakit</li> <li>▪ Puskesmas Pembantu</li> <li>▪ Posyandu</li> </ul>	0 0 2
3	Kantor Kepala Desa	1
4	Pasar Tradisional	1
5	Koperasi	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Kota Rintang, 2007

Pasar tradisional terletak pada pusat Desa Kota Rintang, dilakukan satu kali seminggu yaitu hari Rabu. Selain menjadi tempat berlangsungnya pasar tradisional, bangunan juga digunakan sebagai tempat berlangsungnya pernikahan secara adat.

#### 4.3 Karakteristik Petani Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah petani yang mengusahakan tanaman padi dalam lahan pertaniannya. Karakteristik meliputi luas lahan usahatani, tingkat pendidikan, umur, jumlah tanggungan dan pengalaman bertani. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6. Karakteristik Petani Sampel**

No	Uraian	Satuan	Rataan	Rentang
1	Luas Lahan	Ha	0,62	0,20 – 1,72
2	Umur	Tahun	47,63	35 – 63
3	Pendidian Formal	Tahun	8,40	6 – 12
4	Pengalaman Bertani	Tahun	21,23	5 - 33
5	Jumlah Tanggungan	Jiwa	3,80	1 - 5

Sumber: Analisis Data Primer ( Lampiran 1)

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa umur rata- rata petani sampel adalah 47,63 tahun dengan rentang 35 – 63 tahun. Hal ini berarti bahwa secara umum petani berada pada usia produktif dalam usahatani.

Tingkat pendidikan yang ditempuh petani pada umumnya adalah 8,40 tahun pendidikan formal dengan rentang 6 – 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa petani pada daerah ini masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu setara SMP.

Pengalaman bertani petani sampel Desa Kota Rantang yaitu 21,23 tahun pengalaman dengan rentang 5 – 33 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman bertani petani sudah cukup lama sehingga dianggap memiliki pengalaman panjang dalam bidang pertanian.

Jumlah tanggungan setiap petani pada daerah ini adalah 3,80 jiwa dalam rentang 1 – 5 orang anak. Hal ini menunjukkan bahwa petani memiliki jumlah tanggungan yang sedang. Jumlah tanggungan ke'uarga akan berpengaruh terhadap pendapatan keluarga dan ketersediaan lapangan kerja terutama terhadap anak usia produktif 15 – 60 tahun.

Rata- rata luas lahan usahatani padi petani sampel adalah 0,62 ha dengan rentang 0,20 – 1,72 ha.



### V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas panen, produksi dan rata-rata produksi padi sawah+padi ladang ditunjukkan oleh Tabel 7 di bawah ini.

**Tabel 7. Luas Panen, Produksi dan Rata- rata Produksi Padi Sawah + Padi Ladang menurut Kabupaten/ Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005**

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata- rata Produksi (Kw/ Ha)
1	Nias	20.767	75.061	36,14
2	Mandailing Natal	38.274	166.597	43,53
3	Tapanuli Selatan	87.333	378.787	43,37
4	Tapanuli Tengah	27.908	111.667	40,01
5	Tapanuli Utara	26.669	109.594	41,09
6	Toba Samosir	25.856	109.038	42,17
7	Labuhan Batu	92.354	385.179	41,71
8	Asahan	60.752	258.979	42,63
9	Simalungun	92.895	381.858	41,11
10	Dairi	30.913	101.758	32,92
11	Karo	27.030	87.401	32,33
12	<b>Deli Serdang</b>	<b>76.042</b>	<b>345.033</b>	<b>45,37</b>
13	Langkat	84.074	362.956	43,17
14	Nias Selatan	12.690	47.302	37,28
15	Humbang Hasundutan	11.015	45.142	40,98
16	Pakpak Barat	2.971	7.625	25,66
17	Samosir	8.400	35.655	42,45
18	Serdang Bedagai	75.261	346.985	46,10
19	Sibolga	0	0	0,00
20	Tanjung Balai	3	12	40,00
21	Pematang Siantar	5.333	23.542	44,14
22	Tebing Tinggi	1.184	6.471	43,61
23	Medan	4.108	17.999	43,82
25	Binjai	3.372	14.323	42,48
26	Padangsidempuan	6.569	28.429	43,28
<b>Jumlah</b>		<b>822.073</b>	<b>3.447.394</b>	<b>41,94</b>

Sumber: Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara Tahun, 2005

Dari Tabel 7 menunjukkan usahatani padi didacrah penelitian merupakan tanaman yang sangat banyak diusahakan masyarakat. Desa kota rantang yang mempunyai sumber daya alam yang cukup potensial telah mampu menghasilkan beras yang cukup tinggi. Tabel 7 menunjukkan pula bahwa produksi padi dari Kabupaten Deli Serdang sebesar 345.033 ton dengan luas panen 76.042 ha.

Kabupaten Deli Serdang memiliki produksi beras tertinggi di Sumatera Utara yakni sebesar 382.049 ton atau sekitar 16,95 % dari total produksi Sumatera Utara pada tahun 2003. Untuk data produksi dan konsumsi beras pada setiap Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 8 untuk tahun 2003.

**Tabel. 8. Produksi dan Konsumsi Beras Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003**

No	Kab/ Kota	Produksi Beras (Ton)	Kebutuhan Jan -- Des (Ton)	Surplus/ Defisit (Ton)	Persentase Produksi (%)
1	Langkat	212.428	156.753	55.657	9,42
2	<b><i>Deli Serdang</i></b>	<b>382.049</b>	<b>350.173</b>	<b>31.876</b>	<b>16,95</b>
3	Simalungun	318.191	177.462	140.729	14,11
4	Asahan	189.720	158.711	31.009	8,41
5	Karo	64.226	48.794	15.431	2,85
6	Labuhan Batu	246.466	147.771	92.694	10,67
7	Tapanuli Utara	95.791	67.836	27.955	4,25
8	Toba Samosir	60.671	51.443	9.229	2,69
9	Tapanuli Tengah	46.749	57.008	(10.259)	2,07
10	Tapanuli Selatan	258.507	100.752	157.755	11,47
11	Mandailing Natal	118.292	63.201	55.069	5,25
12	Nias	102.141	119.827	(17.686)	4,53
13	Dairi	104.723	49.655	55.069	4,64
14	Medan	14.820	327.869	(313.059)	0,66
15	Binjai	15.837	37.657	(21.819)	0,70
16	Tebingtinggi	6.083	21.291	(15.208)	0,27
17	Tanjung Balai	787	23.667	(22.890)	0,03
18	Pematang Siantar	10.047	41.558	(31.512)	0,45
19	Padang Sidempuan	13.009	27.104	(14.095)	0,58
	<b>Jumlah</b>	<b>2.254.537</b>	<b>2.028.542</b>	<b>225.985</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, 2003

Adapun perkembangan harga dasar beras yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk lima tahun (1999 – 2004) dapat dilihat pada Tabel 9 :

**Tabel.9 . Perkembangan Harga Pembelian Beras Petani Dalam Negeri oleh BULOG (Rp/Kg) Tahun 1999- 2004**

Tahun	Harga Dasar Beras(Rp/ Kg)	Nomor Impres	Tanggal Impres	Tanggal Berlaku
1999	2.470	32/1998	31/12/1998	01/02/1998
2000	2.470	32/1998	31/12/1998	01/12/1998
2001	2.470	08/2000	10/11/2000	01/10/2001
2002	2.470	09/2001	31/12/2001	02/01/2002
2003	2.790	09/2002	31/12/2002	01/01/2003
2004	2.790	09/2002	31/12/2002	01/01/2003

*Sumber: Badan Urusan Logistik (BULOG) Sumatera Utara, 2003*

Pada tahun 2006 pemerintah menaikkan harga pembelian untuk gabah dan beras yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 2005, yang berlaku untuk Januari 2006. Harga gabah kering panen (GKP) terus dari Rp 1.330 per kg menjadi Rp 1.730 per kg, pemerintah tidak menyiapkannya dengan baik. Salah satu buktinya, saat ada kenaikan harga beras pada bulan Desember tahun lalu, banyak pihak mengatakan, karena stok beras bermasalah. Selain itu harga beras juga meningkat pada tahun 2007 dari Rp 5150/kg menjadi Rp 5400/kg. Peningkatan harga beras ini juga akan mengakibatkan peningkatan harga gabah yaitu dari Rp 1750/kg menjadi Rp 2150/kg. Peningkatan antara harga beras ini dengan peningkatan harga gabah tidak seimbang sehingga mengakibatkan petani dirugikan. Persoalan itu diakibatkan rencana penerapan HPP yang baru. Bila pemerintah cermat, sebenarnya kenaikan itu tidak karena stok menipis. Saat itu pedagang sesungguhnya cenderung menahan stok sebagai tindakan antisipasi kenaikan HPP. Pedagang membeli beras pada saat harga murah dan ingin melepas

begitu pemerintah menerapkan HPP yang baru pada tanggal 1 Januari 2006. Keuntungan akan didapat pedagang dengan menahan stok karena pemerintah menaikkan HPP untuk gabah kering panen. Penahanan ini mengakibatkan harga jual di pasar terus menanjak (Maryoto, Kompas 4 Feb 2006).

### 5.1. Dampak Peningkatan Harga Beras terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Secara Keseluruhan

Untuk mengetahui dampak peningkatan harga beras terhadap tingkat kesejahteraan petani secara menyeluruh digunakan analisis uji beda rata-rata pendapatan. Analisis pendapatan rata-rata petani padi sebelum dan sesudah peningkatan harga beras dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

**Tabel 10. Analisis Uji Beda Rata-rata Pendapatan Petani Padi Sebelum dan Sesudah Peningkatan Harga Beras di Desa Kota Rantang**

	Kondisi	Sebelum Peningkatan Harga Beras			Sesudah Peningkatan Harga Beras		
		per petani	(Rp/Ha)	(Rp/Ha/Thn)	per petani	(Rp/Ha)	(Rp/Ha/Thn)
1	Penerimaan	5560.04	9490.14	18980.28	6910.34	11794.89	23589.78
2	Biaya Produksi						
	- Saprodi	1051.34	1460.47	3545.41	1051.34	1460.47	3545.41
	- Tng Kerja	1491.99	2430.88	4861.75	1491.99	2430.88	4861.75
	- Penyusutan						
3	Pendapatan	2945.47	5463.71	10311.96	4295.76	7577.627	14921.46
		t- hitung uji rata-rata pendapatan bersih per petani = 10,244					
		t- tabel = 2.045					

Sumber : Analisis Data Primer 2007

Berdasarkan analisis uji beda rata- rata pendapatan diperoleh bahwa  $t$ -hitung = 10,244 dengan demikian berarti  $t$ -hitung lebih besar daripada  $t$ -tabel = 2,045 ( $\alpha = 0,05$ ), maka keputusan hipotesis adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima pada tingkat kepercayaan 95% artinya terdapat perbedaan nyata antara rata- rata pendapatan petani sebelum peningkatan harga beras dan sesudah peningkatan harga beras, dimana pendapatan per petani sebelum peningkatan harga beras lebih kecil dari pada sesudah peningkatan harga beras.

Pendapatan petani padi per petani sebelum terjadi peningkatan harga beras didapat dengan penjualan per kilogram gabah rata- rata Rp 1750/ kg, sedangkan sesudah terjadi peningkatan harga beras akan mengakibatkan harga gabah juga meningkat sehingga pendapatan petani diperoleh dari penjualan per kilogram gabah rata- rata Rp 2175/ kg yang dijual langsung kepada para tengkulak. Peningkatan harga ini akan mengakibatkan tingkat pendapatan petani akan meningkat juga, hal ini sesuai dengan teori surplus produsen yang mengatakan bahwa jika semakin tinggi harga yang terjadi dipasar maka keuntungan akan diperoleh produsen dengan menawarkan sejumlah barang. Harga yang terjadi sebelum peningkatan harga beras di daerah penelitian rata- rata Rp 5150/kg, sedangkan sesudah terjadi peningkatan harga maka harga beras rata- rata Rp 5400/kg. Akibat adanya peningkatan harga beras ini maka, petani sebagai pihak produsen dan juga sebagai konsumen tidak mendapatkan keuntungan. Hal ini disebabkan karena pendapatan petani dari hasil penjualan gabah tidak sesuai dengan korbanan yang mereka keluarkan dalam membeli beras sebagai bahan makanan pokok mereka sehari- hari. dapat disimpulkan bahwa peningkatan harga beras ini akan membawa dampak terhadap tingkat kesejahteraan petani.

Berdasarkan analisis uji beda rata-rata pendapatan diperoleh bahwa  $t$ -hitung = 10,244 dengan demikian berarti  $t$ -hitung lebih besar daripada  $t$ -tabel = 2,045 ( $\alpha = 0,05$ ), maka keputusan hipotesis adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima pada tingkat kepercayaan 95% artinya terdapat perbedaan nyata antara rata-rata pendapatan petani sebelum peningkatan harga beras dan sesudah peningkatan harga beras, dimana pendapatan per petani sebelum peningkatan harga beras lebih kecil dari pada sesudah peningkatan harga beras.

Pendapatan petani padi per petani sebelum terjadi peningkatan harga beras didapat dengan penjualan per kilogram gabah rata-rata Rp 1750/ kg, sedangkan sesudah terjadi peningkatan harga beras akan mengakibatkan harga gabah juga meningkat sehingga pendapatan petani diperoleh dari penjualan per kilogram gabah rata-rata Rp 2175/ kg yang dijual langsung kepada para tengkulak. Peningkatan harga ini akan mengakibatkan tingkat pendapatan petani akan meningkat juga, hal ini sesuai dengan teori surplus produsen yang mengatakan bahwa jika semakin tinggi harga yang terjadi dipasar maka keuntungan akan diperoleh produsen dengan menawarkan sejumlah barang. Harga yang terjadi sebelum peningkatan harga beras di daerah penelitian rata-rata Rp 5150/kg, sedangkan sesudah terjadi peningkatan harga maka harga beras rata-rata Rp 5400/kg. Akibat adanya peningkatan harga beras ini maka, petani sebagai pihak produsen dan juga sebagai konsumen tidak mendapatkan keuntungan. Hal ini disebabkan karena pendapatan petani dari hasil penjualan gabah tidak sesuai dengan korbanan yang mereka keluarkan dalam membeli beras sebagai bahan makanan pokok mereka sehari-hari. dapat disimpulkan bahwa peningkatan harga beras ini akan membawa dampak terhadap tingkat kesejahteraan petani.

## 5.2. Perbedaan Dampak Peningkatan Harga Beras terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Pada Beberapa Strata Luas Lahan

Untuk mengetahui perbedaan dampak peningkatan harga beras terhadap tingkat kesejahteraan petani pada beberapa strata luas lahan dapat analisis dengan melakukan uji beda rata-rata pendapatan bersih pada setiap strata luas lahan.

### 5.2.1. Uji Beda Rata-rata Pendapatan Bersih Luas Lahan < 0,5 ha

Untuk mengetahui dampak peningkatan harga beras terhadap tingkat kesejahteraan petani per hektar pada strata I dengan luas lahan lebih kecil dari 0,5 hektar dilakukan analisis uji beda rata-rata pendapatan bersih per hektar.

**Tabel 11. Analisis Uji Beda Rata-rata Pendapatan Bersih Strata I Menurut Luas Lahan Per Hektar Per Musim Tanam**

Kondisi	Jumlah Sampel	Rata-rata pendapatan bersih usahatani (Rp/hektar)	Harga Gabah (Rp)	Harga Beras (Rp)
Harga beras sebelum naik	15	6068.28	1750	5150
Harga beras sesudah naik	15	8458.86	2175	5400
t-hitung : 99,480				
t-tabel : 2,145				

Sumber : Analisis Data Primer, 2007

Berdasarkan analisis uji beda rata-rata pendapatan bersih strata I menurut luas lahan usahatani padi sebelum terjadi peningkatan harga dan sesudah terjadi peningkatan harga beras diperoleh t-hitung = 99,480 dengan demikian t-hitung lebih besar dari t-tabel = 2,145 ( $\alpha_{1/2, 0,05}$ ), maka keputusan hipotesis adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima pada tingkat kepercayaan 95% artinya terdapat perbedaan dampak yang nyata yang diakibatkan oleh adanya peningkatan harga

beras pada strata I menurut luas lahan ( $<0,5$  ha). Pendapatan lebih besar diperoleh petani pada saat harga beras meningkat jika dibandingkan dengan sebelum terjadi peningkatan harga beras. Adanya peningkatan harga beras ini akan mengakibatkan juga terjadinya peningkatan harga gabah. Akan tetapi, peningkatan harga antara harga beras dengan harga gabah ini tidak sebanding. Petani menjual harga gabah jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga beras. Dapat disimpulkan bahwa, petani yang hanya menjual gabah dengan Rp1750/kg (sebelum terjadi kenaikan harga) akan membeli beras dengan harga Rp 5150/kg. Sesudah terjadi kenaikan harga beras sebesar Rp 5400/kg, maka harga gabah juga akan naik menjadi Rp 2175/kg. Sebagai akibat dari peningkatan harga beras ini maka petani kurang diuntungkan dan ada dampak terhadap tingkat kesejahteraan petani.

Untuk mengetahui dampak peningkatan harga beras terhadap tingkat kesejahteraan petani pada strata I per tahun dengan luas lahan lebih kecil dari 0,5 hektar dilakukan analisis uji beda rata-rata pendapatan bersih per tahun.

**Tabel 12. Analisis Uji Beda Rata-rata Pendapatan Bersih Strata I Menurut Luas Lahan Per Tahun Per Musim Tanam**

Kondisi	Jumlah Sampel	Rata-rata pendapatan bersih usahatani (Rp/tahun)	Harga Gabah (Rp)	Harga Beras (Rp)
Harga beras sebelum naik	15	10905.62	1750	5150
Harga beras sesudah naik	15	15686.79	2175	5400
t-hitung : 99,881				
t-tabel : 2,145				

Sumber : Analisis Data Primer, 2007

Berdasarkan analisis uji beda rata-rata pendapatan bersih usahatani per tahun diperoleh  $t\text{-hitung} = 99,881$  dengan demikian  $t\text{-hitung}$  lebih besar dari  $t\text{-tabel} = 2,145(\alpha_{1/2}, 0,05)$ , maka keputusan hipotesisi adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima pada tingkat kepercayaan 95% artinya terdapat perbedaan yang nyata pendapatan bersih yang disebabkan oleh peningkatan harga beras, dimana pendapatan bersih per tahun oleh petani jauh lebih tinggi pada saat peningkatan harga beras jika dibandingkan pada saat harga beras belum mengalami peningkatan.

### 5.2.2 Dampak Peningkatan Harga Beras terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Pada Luas Lahan 0,5-1 ha

Untuk mengetahui dampak peningkatan harga beras terhadap tingkat kesejahteraan petani pada strata II dengan luas lahan antara 0,5 - 1 hektar dilakukan analisis uji beda rata-rata pendapatan bersih per hektar.

**Tabel 13. Analisis Uji Beda Rata-rata Pendapatan Bersih Strata II Menurut Luas Lahan Per Hektar Per Musim Tanam**

Kondisi	Jumlah Sampel	Rata-rata pendapatan bersih usahatani (Rp/hektar)	Harga Gabah (Rp)	Harga Beras (Rp)
Harga beras sebelum naik	11	5254.45	1750	5150
Harga beras sesudah naik	11	7110.28	2175	5400
t-hitung : 3,736				
t-tabel : 2,228				

Sumber : Analisis Data Primer, 2007

Berdasarkan analisis uji beda rata-rata pendapatan bersih usahatani per hektar diperoleh  $t$ -hitung = 3,736 dengan demikian  $t$ -hitung lebih besar dari  $t$ -tabel = 2,228 ( $\alpha_{1/2, 0,05}$ ), maka keputusan hipotesis  $H_0$  ditolak dan hipotesis  $H_1$  diterima pada tingkat kepercayaan 95% artinya terdapat perbedaan yang nyata pada pendapatan bersih usahatani per hektar petani yang diakibatkan oleh peningkatan harga beras. Ternyata peningkatan harga beras ini akan memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan petani. Petani sebagai produsen (penghasil padi) juga sekaligus sebagai konsumen sangat merasakan dampak peningkatan harga beras ini. Petani menjual gabah kepada para tengkulak dengan harga yang murah akan tetapi petani juga akan membeli beras sebagai bahan makanan pokok sehari-hari dengan harga yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan dampak peningkatan harga beras ini sangat besar terhadap petani yang mempunyai lahan antara 0,5- 1 ha. Hal ini disebabkan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan selama proses produksi padi yaitu sebesar Rp 4530.34. Peningkatan harga beras ini tidak membawa keuntungan kepada para petani, karena pendapatan yang diterima dari usaha tani tidak sebanding dengan pengeluaran dalam membeli beras.

Untuk mengetahui dampak peningkatan harga beras terhadap tingkat kesejahteraan petani pada strata II per tahun dengan luas lahan antara 0,5 - 1 hektar dilakukan analisis uji beda rata-rata pendapatan bersih per tahun.

**Tabel 14. Analisis Uji Beda Rata- rata Pendapatan Bersih Strata II Menurut Luas Lahan Per Tahun Per Musim Tanam**

Kondisi	Jumlah Sampel	Rata-rata pendapatan bersih usahatani (Rp/tahun)	Harga Gabah (Rp)	Harga Beras (Rp)
Harga beras sebelum naik	11	10508.89	1750	5150
Harga beras sesudah naik	11	15261.50	2175	5400
t-hitung : 46,642				
t-tabel : 2,228				

Sumber : Analisis Data Primer, 2007

Berdasarkan analisis uji beda rata- rata pendapatan bersih usahatani per tahun diperoleh t-hitung = 46,642 dengan demikian t-hitung lebih besar dari t-tabel = 2,228 ( $\alpha_{1/2}, 0,05$ ), maka keputusan hipotesis adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima pada tingkat kepercayaan 95% artinya peningkatan harga beras ini akan membawa dampak yang nyata terhadap tingkat kesejahteraan petani. Terjadinya peningkatan harga beras ini juga diikuti oleh peningkatan harga gabah, akan tetapi akibat dari peningkatan harga beras jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan harga gabah maka pendapatan bersih petani di daerah penelitian tidak sebanding dengan korbanan yang akan mereka keluarkan dalam mendapatkan beras. Di daerah penelitian, petani harus membeli beras dengan harga Rp5400/kg sebagai bahan pangan. Meskipun harga gabah meningkat tetapi petani tidak memperoleh surplus.

### 5.2.3 Dampak Peningkatan Harga Beras terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Pada Luas Lahan >1 ha

Untuk mengetahui dampak peningkatan harga beras terhadap tingkat kesejahteraan petani per hektar pada strata III dengan luas lahan > 1 hektar dilakukan analisis uji beda rata- rata pendapatan bersih per hektar.

**Tabel 15. Analisis Uji Beda Rata- rata Pendapatan Bersih Strata III Menurut Luas Lahan Per Hektar Per Musim Tanam**

Kondisi	Jumlah Sampel	Rata-rata pendapatan bersih usahatani (Rp/hektar)	Harga Gabah (Rp)	Harga Beras (Rp)
Harga beras sebelum naik	4	3772.09	1750	5150
Harga beras sesudah naik	4	5558.18	2175	5400
t-hitung : 14,165				
t-tabel : 3,182				

Sumber : Analisis Data Primer, 2007

Berdasarkan analisis uji beda rata- rata pendapatan bersih per hektar diperoleh t-hitung = 14,165 dengan demikian t-hitung lebih besar dari t-tabel = 3,182 ( $\alpha_{1/2}, 0,05$ ), maka keputusan hipotesis adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima pada tingkat kepercayaan 95% artinya ada perbedaan yang nyata pendapatan bersih usahatani padi. Hal ini disebabkan karena peningkatan harga beras yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan harga gabah. Dampak dari peningkatan harga beras ini adalah tingkat kesejahteraan petani tidak tercapai karena petani harus membeli beras dengan harga yang tinggi, sedangkan pendapatan yang diterima petani di daerah penelitian tidak sebanding. Jika peningkatan harga beras ini sejalan dengan peningkatan harga gabah maka petani akan memperoleh surplus.

Untuk mengetahui dampak peningkatan harga beras terhadap tingkat kesejahteraan petani per tahun pada strata III dengan luas lahan > 1 hektar dilakukan analisis uji beda rata- rata pendapatan bersih per tahun.

**Tabel 16. Analisis Uji beda Rata- rata Pendapatan Bersih Strata III Menurut Luas Lahan Per Tahun Per Musim Tanam**

Kondisi	Jumlah Sampel	Rata-rata pendapatan bersih usahatani (Rp/tahun)	Harga Gabah (Rp)	Harga Beras (Rp)
Harga beras sebelum naik	4	7544.19	1750	5150
Harga beras sesudah naik	4	11116.37	2175	5400
t-hitung : 14,165				
t-tabel : 3,182				

*Sumber : Analisis Data Primer, 2007*

Berdasarkan analisis uji beda rata- rata pendapatan bersih per hektar diperoleh t-hitung = 14,165 dengan demikian t-hitung lebih besar dari t-tabel = 3,182 ( $\alpha_{1/2, 0,05}$ ), maka keputusan hipotesis adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima pada tingkat kepercayaan 95% artinya ada perbedaan yang nyata pendapatan bersih usahatani padi. Hal ini disebabkan oleh pendapatan bersih per tahun sebelum terjadi peningkatan harga beras jauh lebih rendah jika dibandingkan sesudah mengalami peningkatan harga beras. Ternyata kenaikan harga jual gabah ini belum cukup untuk mengimbangi harga dari beras sehingga petani tidak memperoleh keuntungan dalam menjual gabah.

## VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

1. Peningkatan harga beras memberikan dampak terhadap harga gabah di Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menyatakan adanya peningkatan harga beras ini akan menyebabkan harga gabah meningkat sehingga pendapatan bersih petani juga meningkat.
2. Peningkatan harga beras memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan petani secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji *t* rata-rata pendapatan bersih petani dengan tingkat kepercayaan 95%, *t*-hitung = 10,244 lebih besar dari *t*-tabel 2,045 yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
3. Peningkatan harga beras memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan petani pada strata luas lahan sempit (< 0,5 ha) per hektar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji *t* rata-rata pendapatan bersih petani per hektar dengan tingkat kepercayaan 95%, *t*-hitung = 99,480 lebih besar dari *t*-tabel 2,145 yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
4. Peningkatan harga beras memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan petani pada strata luas lahan sempit (< 0,5 ha) per hektar per tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji *t* rata-rata pendapatan bersih petani per hektar per tahun dengan tingkat

kepercayaan 95%,  $t$ -hitung = 99,881 lebih besar dari  $t$ -tabel 2,145 yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

5. Peningkatan harga beras memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan petani pada strata luas lahan sedang (1 - 0,5 ha) per hektar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji  $t$  rata-rata pendapatan bersih petani per hektar dengan tingkat kepercayaan 95%,  $t$ -hitung = 3,736 lebih besar dari  $t$ -tabel 2,228 yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
6. Peningkatan harga beras memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan petani pada strata luas lahan sedang (1- 0,5 ha) per hektar per tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji  $t$  rata-rata pendapatan bersih petani per hektar per tahun dengan tingkat kepercayaan 95%,  $t$ -hitung = 46,642 lebih besar dari  $t$ -tabel 2,228 yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
7. Peningkatan harga beras memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan petani pada strata luas lahan lebih besar dari 1 ha per hektar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji  $t$  rata-rata pendapatan bersih petani per hektar dengan tingkat kepercayaan 95%,  $t$ -hitung = 14,165 lebih besar dari  $t$ -tabel 3,182 yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
8. Peningkatan harga beras memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan petani pada strata luas lahan lebih besar 1 ha per hektar per tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji  $t$  rata-rata pendapatan bersih petani per hektar per tahun dengan tingkat

kepercayaan 95%,  $t$ -hitung = 14,165 lebih besar dari  $t$ -tabel = 3,182 yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

## 6.2. Saran

1. Diharapkan petani menyimpan gabah panen mereka sebagai stok bahan makanan sehari-hari, sehingga pada saat harga beras meningkat, stok tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan sehari-hari (tanpa membeli beras).
2. Diharapkan petani agar mengusahakan tanaman sampingan sebagai penghasilan sampingan.
3. Agar petani mengadakan kontak secara kontinu dengan pemerintah untuk mengetahui perkembangan harga beras maupun harga gabah di daerah Kota Rintang.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAK, 1990. *Budidaya Tanaman Padi*. Kanisius., Yogyakarta.
- Arman, M dan Wijonarko, A., 1998, *Swasembada Beras Dan Dampak Ekologisnya*, Dimensi Warta Sains dan Teknologi, Vol 1. No. 1 Juni 1998, ISTECS- Jepang, Jakarta.
- Gubernur SUMUT. *Kebijakan dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Propinsi SUMUT Tahun 2004*. Deperindag, Medan.
- Harian Kompas 27 Desember 2005. *Jakarta Kurang Beras Harga Lokal Melambung*
- Irawan, A., 1997. *Kebijakan Harga dan Keberlanjutan Produksi Padi di Luar Jawa*, Harian Kompas 13 Februari 1997, Jakarta, hal 8.
- Kadariah, 1994. *Teori Ekonomi Mikro*. Lembaga Penerbit FE- UI. Jakarta.
- Khomsan, A., *Impor Beras (Lagi ?)*, Harian Kompas 22 Desember 2006.
- Lubis A. E., 2005. *Perencanaan Koorporasi Peningkatan Ketahanan Pangan di Propinsi Sumatera Utara*. Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara, Medan.
- Maryoto, A., *Di Balik Naiknya Harga Beras*, Harian Kompas, 4 Februari 2006
- Moeis, E., *Stok Pangan di Sumut Mantap*, Harian Waspada 20 Maret 2004, Medan, hal 10.
- Mubyarto, *Makalah Kondisi Kemiskinan Pedesaan di Indonesia*, LPSP, IPB, Bogor, 1991, hlm 8.
- Noor, M., 1996. *Padi Lahan Marginal*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Rohidi, T.R, *Ekspresi Seni Orang Miskin Adaptasi Simbolik Terhadap Kemiskinan*, Yasaguna Nuansa Cendikia, Bandung, 2000, hlm 24-25.
- Sajokyo, dkk, *Panen 20 Tahun Ringkasan Tesis dan Disertasi, Studi Sosiologi Pedesaan Program*.
- Sibuea P., *Berdaulatkah Indonesia atas Pangan ?*. Harian Kompas !6 Januari 2007.